

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN sebagai *agent of development* diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang dapat membantu mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Budaya Bisnis yang sehat dan komitmen manajemen yang kuat sangat dibutuhkan oleh BUMN agar mampu bertahan dalam persaingan global maka dibutuhkan budaya GCG atau tata kelola perusahaan.

Sejak Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia, GCG mulai populer dalam rangka menjadi evaluasi untuk menghasilkan sistem GCG yang lebih baik serta mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang mendatang. Ada kemungkinan yang kuat bahwa krisis ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia belum menjalankan GCG (Kurniawan dan Indriantoro: 2000).

Begitu banyak perusahaan yang gulung tikar akibat tidak terwujudnya GCG. Salah satu penyebab bangkrutnya perusahaan yaitu adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut Tirmidzi¹, GCG di Indonesia belum bisa

¹ *Seminar tentang Good Corporate Governance (GCG) dan modelling GCG pada 3 Juli 2009*

mencapai kata "good". Indonesia menduduki golongan tertinggi kedua di Dunia dalam hal penyuaipan di pelayanan publik. Pernyataan Tirmidzi tersebut didukung oleh data yang disurvei oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW).

ICW menemukan indikasi korupsi sekitar Rp 10,484 triliun di sejumlah Badan Usaha Milik Negara selama 2004-2006. Temuan ini berdasarkan 57 kasus yang sudah terungkap dengan indikasi merugikan negara.

Wakil Koordinator ICW Ridaya La Ode Ngkowe menuturkan indikasi kerugian negara terbesar adalah di sektor keuangan, yaitu perbankan dan asuransi dengan nilai sekitar Rp 5,3 triliun. Kerugian yang ditimbulkan di sektor energi dan listrik menempati urutan kedua, sekitar Rp 3 triliun.

Firdaus Ilyas dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW mengatakan modus penyimpangan yang paling banyak dilakukan adalah penggelembungan (markup) proyek dengan total kerugian sekitar Rp 4 triliun. Selain itu, modus manipulasi dan kredit macet senilai Rp 2,87 triliun dan Rp 2,2 triliun. (Koran Tempo, 30 November 2007)

Adanya indikasi kasus yang ditemukan pada BUMN menyebabkan kerugian. Kerugian yang dialami oleh BUMN ini tentu saja merugikan negara. Kerugian tersebut tampak dalam data ICW yang diperbandingkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap BUMN selama 2005 hingga semester pertama 2007. "Dari hasil audit, ditemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 4,2 triliun dan kekurangan penerimaan Rp 6,4 triliun." (Koran tempo, 30 November 2007)

Kerugian tersebut menggambarkan bagaimana kesehatan BUMN saat ini yang artinya mencerminkan rapor BUMN.

Sementara menurut kajian *Pricewaterhouse Coopers* yang dimuat dalam *Report on Institutional Investor Survey* (2002) menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk

mekanisme institusional dan budaya GCG, dan dengan total 3,2. Meskipun skor Indonesia di tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara-negara Asia. Faktor-faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah di antara Negara-negara lain yang sedang tumbuh di Asia. (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, VOL.8, NO. 1, Maret 2006: 1-9)

Data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih belum melakukan GCG sebagai budaya dalam perusahaan. Berbagai model GCG telah diciptakan namun hasil riset menunjukkan bahwa kualitas GCG perusahaan di Indonesia belum optimal, terutama pada BUMN seperti survei yang dilakukan oleh tim riset majalah SWA dengan menjangkau 100 responden yang terdiri atas para analis dan investor Berikut merupakan hasil survei:

Tabel 1.1
Peringkat Indonesia *Good Governance* Index
(Survei Investor dan Analisis)

No	Perusahaan	Transparansi	Akuntabilitas	Responsibilitas	Independensi	Fairness	Total
1	Bank Mandiri	85.82	88.09	88.05	69.74	74.71	81.28
2	Astra Agro lestari	83.72	84.36	82.69	75.96	79.62	81.27
3	Bank Niaga	83.50	80.33	81.00	77.00	84.00	81.17
4	BRI	82.67	83.92	79.12	76.32	72.50	78.91
5	Unilever Indonesia	80.08	78.63	80.89	78.84	72.77	78.24
6	Astra International	78.75	79.26	80.20	78.56	73.80	78.12
7	United tractors	79.33	76.85	79.44	77.50	72.78	77.93
8	Akr Corporindo	79.93	75.83	75.63	76.88	82.50	77.92
9	International Noken Indonesia	76.40	78.33	75.50	73.50	70.83	75.50
10	BNI	77.31	73.81	73.21	76.07	75.71	74.55
11	Telekomunikasi Indonesia	76.14	75.74	76.37	74.10	69.39	74.40
12	BCA	81.25	75.06	76.02	73.70	69.48	74.32
13	Indosat	75.22	74.94	76.70	74.29	69.23	74.26
14	Wijaya Karya	76.62	76.39	77.50	68.33	67.50	74.19
15	Timah	75.22	76.44	74.67	74.33	69.33	74.00
16	Tambang Batu Bara Bukit Asam	76.62	75.69	75.15	74.85	67.21	73.90
17	Aneka Tambang	76.02	75.31	75.41	73.43	68.16	73.67
18	Semen Gresik	74.29	73.81	77.14	73.93	62.86	72.40
19	Berlian Laju Tanker	73.50	76.33	77.00	67.50	64.50	71.77
20	Perusahaan Gas Negara	75.03	73.97	71.73	73.08	64.81	71.72
21	Indofood Sukses Makmur	74.72	70.93	72.36	71.94	68.33	71.66
22	Adaro Energy	63.86	69.29	69.64	66.43	66.43	67.13
23	Kalbe Farma	61.78	70.61	63.33	64.17	60.83	64.14
34	Jasa Marga	65.17	64.00	67.25	63.00	60.60	64.00
25	Bakrie & Brothers	56.42	60.91	53.64	59.55	59.77	58.06
26	Bumi Resources	57.63	60.17	61.16	57.07	52.64	57.73

Sumber : majalah SWA

Keterangan:

- a. Survei dilakukan terhadap 100 responden (investor dan analisis) pada 10-28 november 2008
- b. Rating level
 - Sangat Terpercaya (85,00-100)
 - Terpercaya (70,00-84,99)
 - Cukup terpercava (55.00-69.99)

Vita Novrita, 2012

Pengaruh Audit Internal Terhadap ...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

GCG tertinggi. Namun, hanya beberapa BUMN yang mempunyai GCG yang berpredikat sangat terpercaya dan terpercaya. PT Telkom berada pada urutan 11 yang artinya sudah terpercaya, hal tersebut dikarenakan Telkom memiliki *top of mind* pada para investor. Dengan hasil perolehan survei ini, diperoleh gambaran emiten mana saja yang sudah menerapkan GCG dengan baik. Penerapan GCG pada BUMN bisa dikatakan belum mencapai optimal, karena dari 140 BUMN hanya sepuluh BUMN yang masuk ke 26 besar dimata investor dan analis.

Masalah-masalah diatas menandakan kurang adanya perhatian dari BUMN terhadap kepentingan stakeholder yang berdasarkan prinsip GCG yaitu, keadilan (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kemandirian (*Independency*) Adrian Sutedi (2011: 4)

Seharusnya BUMN sebagai badan publik yang sangat dekat dengan kebebasan memperoleh informasi publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dalam rangka meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara benar dan penerapan GCG belum optimal.

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai hubungan antara suatu perusahaan dengan pemegang sahamnya. Menurut keputusan Menteri BUMN No. KEP -117 /M-MBU/2002 GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Jadi fungsi GCG membantu mencapai tujuan perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara harus dijadikan sebagai badan publik dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KIP), sehingga BUMN juga memiliki kewajiban menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dalam rangka meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi. Oleh karena itu GCG bukan hanya dijadikan sebuah aturan tetapi menjadi budaya organisasi.

Selain budaya organisasi, fungsi audit internal yang efektif diyakini mampu memberikan dukungan terhadap peningkatan GCG, pengelolaan resiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan dukungan bagi Komisaris, Komite Audit, Direksi dan Manajemen untuk mengembangkan GCG.

BUMN wajib menembangkan fungsi internal audit yang efektif guna membantu pihak manajemen melakukan proses penilaian resiko dan pengendalian internal. Fungsi internal audit yang efektif harus memiliki karakteristik independen, mempunyai staf yang kompeten, di dukung sumber daya yang memadai. Fungsi internal audit memberikan penilaian atas pengendalian internal dan proses pengelolaan resiko.

Internal audit atau pemeriksaan intern adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. (Hiro Tugiman, 11: 2006)

Tujuan dari pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melakukan tanggung jawab secara efektif. Pemeriksaan

internal akan melakukan analisis, penilaian dan pengajuan saran-saran. Tujuan pemeriksaan intern mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar.

Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan atau direksi wajib konsisten dengan Norma Praktek Audit Profesional.

Beberapa masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan Audit Internal adalah seberapa efektif keberadaan audit internal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan. *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menjawabnya dengan menetapkan kriteria dan standar profesi Audit Internal harus mampu menjaga profesi agar memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Namun di Indonesia masih ada auditor yang menjalankan profesinya tidak berdasarkan kualifikasi seperti apa yang diungkapkan oleh Hiro Tugiman berikut ini:

Sampai saat ini *uncertified* internal auditor dapat saja menandatangani laporan auditnya. Banyak auditor Indonesia ditunjuk oleh pimpinan organisasinya bukan berdasarkan kualifikasi seseorang dalam audit internal, melainkan karena perannya. Masih banyak sikap auditor internal yang mengharapkan kesuksesan dengan menyampaikan temuan dan menyajikan hal-hal yang tidak mengenai *auditee* dan manajer. Tidak sedikit auditor internal melaksanakannya tugasnya dengan suatu perselisihan, serta menonjolkan kewenangan yang melekat pada dirinya. (Hiro Tugiman, 2006: 2)

Sikap profesional patut diperlukan oleh seorang auditor dengan adanya monitoring. Monitoring dibutuhkan perusahaan dalam rangka penilaian terhadap internal audit pada setiap tingkat unit struktur BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan disampaikan kepada komite audit seperti yang tercantum dalam keputusan menteri BUMN tentang penerapan praktek GCG dalam BUMN pasal 22 tentang pengendalian internal.

Sejalan dengan pengendalian internal, para ahli berkeyakinan bahwa dengan dukungan audit internal yang professional dapat memperbaiki proses dan pengendalian manajemen sehingga membantu pimpinan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan untuk keuntungan manajemen dan para *stakeholder* sehingga audit internal turut serta mendorong terlaksananya implementasi GCG di BUMN.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik menulis skripsi mengenai pengaruh audit internal terhadap GCG, dengan judul “Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada BUMN”

1.2 Rumusan Masalah

BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Namun hal tersebut belum dapat terwujud karena ada beberapa kendala. Berikut beberapa masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis:

- Masih adanya praktik KKN di BUMN sehingga GCG tidak dapat dijalankan secara optimal.
- Kurangnya kesadaran BUMN dalam melaksanakan prinsip GCG yang terbukti berdasarkan survei majalah SWA
- Auditor belum menjalankan sikap profesionalismenya sesuai dengan standar.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis dapat merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Audit Internal pada BUMN?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMN?
3. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada BUMN?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan mengenai pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance* pada BUMN.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Audit Internal pada BUMN
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BUMN

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh audit internal pada *Good Corporate Governance* pada BUMN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Akademis (Keilmuan)

Penelitian diharapkan berguna untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya mengenai bahasan audit internal maupun GCG dengan memberikan sumbangan bagi konsep-konsep yang sudah ada.

Selain itu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang berkaitan dengan penelitian ini dan membantu memberikan pemahaman tentang audit internal maupun GCG.

2. Aspek Praktis (Guna laksana)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada perusahaan dan menjadi bahan pemikiran yang berguna di masa yang akan datang, yaitu mengetahui pengaruh audit internal terhadap GCG, membantu perusahaan dalam rangka melaksanakan GCG, dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang masih perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki di waktu mendatang.